

ISLAM DAN PLURALISME: KONSEP DAN STRATEGI IMPLEMENTASI DI PERSEKOLAHAN

ABSTRACT

Islam is a holistic religion of public religion, and the closing religion that teaches divinity and humanity, including the problem of pluralism. The definition of pluralism in this case can be categorized in social pluralism and political pluralism. Social pluralism has meaning, historical trends, bases, mission, theory, and recognition of religions. Likewise, political pluralism has meaning, interpretation, action, concept, postulate, historical, and conditions in its implementation. Pluralism, in its form requires actualization from generation to generation so that the values and norms that exist in society and culture can be developed. Efforts to develop these values and norms in life and life occur in the education process. Pluralism education in schools requires clarity on the notion of pluralism education itself, it needs an effort to reorient Islamic religious education, and the approach to the implementation of education, as well as the pluralism education model in schooling.

A. Pendahuluan

Islam¹ menurut mayoritas pemeluknya adalah agama holistik. Islam tidak hanya diartikan sebagai agama tauhid belaka, melainkan ajaran yang menyangkut semua aspek kehidupan.² agama publik, pluralisme agama tidak sekedar persoalan mengakomodasi klaim-klaim kebenaran agama dalam wilayah pribadi, tetapi juga persoalan kebijakan publik di mana pemimpin muslim harus mengakui dan melindungi kebebasan beragama, tidak hanya intra-umat Islam, tetapi antar-agama.³, dan agama penutup yang mengajarkan ketuhanan dan kemanusiaan, termasuk di dalamnya persoalan pluralisme. Pluralisme adalah sesuatu terlahir dari dalil ajaran ketuhanan. Akal menyimpulkan bahwa jika keesaan hanya milik Allah, maka selainNya tidak layak untuk menyandangnya yang berarti selain Allah adalah pluralitas.⁴

Al-Qur'an sebagai sumber pokok ajaran Islam menggambarkan pluralisme lebih banyak jumlahnya dari pada pengagum prinsip ini. Al-Qur'an tidak hanya sekedar mengungkap isyarat-isyarat pluralisme secara umum. Hal ini dapat ditemui dalam gaya bahasa, pola susunan kalimat, tema-tema pluralisme, bahkan sampai kaidah-kaidah yang mencapai puncaknya, ketika Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap pluralitas agama untuk dapat hidup secara berdampingan⁵. Al-Qur'an dalam hubungan antaragama dapat dilihat dalam beberapa

¹ Islam, Wasmo, *Berbagi Ilmu* (Jakarta: Gelora, 2014), 23.

² Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I (Yogyakarta: UII Press), 31-49. Sebagai agama dan negara. Lihat Khamami Zada, Arif R. Arafah, *Diskursus politik Islam* (Jakarta: LSIP, 2004), 6. Islam meliputi segala aspek kehidupan dengan komprehensif. Lihat dalam Fathurrahma Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 47.

³ Lihat Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 5. Islam telah digambarkan sebagai suatu kepercayaan dalam ranah publik dalam komitmen sadarnya membangaun suatu tatanan publik etis.. Lihat dalam Marshall G.S Hodgson, *The Venture of Islam: Conscience and History in a Waorld Civilization* (Chicago; University of Chicago Press, 1977), vol 1, 336.

⁴ Lihat Gamal Al-Banna, *At Ta'adudiyah Fi Mujtama' Islamy*. Ter. Ahmad Z.H. (Jakarta: MataAir Publishing, 2006), 1-5.

⁵ Lihat Gamal Al-Banna, *At Ta'adudiyah Fi Mujtama' Islamy*. Ter. Ahmad Z.H. (Jakarta: MataAir Publishing, 2006), 7-18.

petunjuk, diantaranya yaitu: (1) istilah Islam memiliki banyak hubungan. Hal ini dapat dilihat dalam al-Qur'an 59:23, 6:127, 13:26, dan 10:10, (2) keimanan kepada Allah Yang Maha Esa dan Universal, (3) kesatuan dan universalitas ajaran inti dari semua nabi. Hal tersebut dijelaskan dalam al-Qur'an 2:286, 4:163, 42:13, 17:55, 2:253, dan 17:21, (4) martabat universal manusia, seperti dalam al-Qur'an 95:4, 2:43, 2:30, dan 31:20, (5) keadilan universal, seperti di dalam al-Qur'an 55:5-9, 7:28, 16:90, dan 57:25, (6) persaudaraan universal, seperti dalam al-Qur'an 49:13 (6) penerimaan dalam kemajemukan dalam masyarakat manusia, seperti dalam al-Qur'an 5:48, 11:118, dan 10:99, (7) larangan memaksakan keimana, seperti dalam al-Qur'an 2:143, 16:125, 2:256, 88:21-26, 10:99, dan 42:48, (8) rahmat universal, seperti dalam al-Qur'an 21:107, (10) hidup bersama secara damai dan universal, seperti dalam al-Qur'an 60:8-9 dan (11) dialog yang damai, seperti dalam al-Qur'an 91:8, 5:5, dan 3:63⁶.

Islam melalui kesaksian fakta sejarah sejak zaman *Rasulullah*, dan *Khulafah al-Rashidin*. Seperti perjanjian Rasulullah saw dengan bangsa Yahudi Yathrib yang dikenal dengan "Piagam Madinah" atau "Konstitusi Madinah", perjanjian serupa yang dilakukan Rasulullah saw dengan bangsa Yahudi di wilayah utara semenanjung Arab. Setelah perang Khaybar (tahun 7 H.), dan tahun-tahun berikutnya seperti dengan Bani Junbah di Muqna dekat dengan *Yathrib* di teluk aqabah, dengan pemeluk agama Majusi. Pada masa *Khulafah al-Rashidin*, wilayah kedaulatan Islam semakin luas sehingga masyarakatnya pun semakin banyak jumlahnya, kompleks dan pluralistik.⁷ Hal tersebut berlangsung hingga para pemeluknya di era modern, secara terpencair-pencar telah membuka jalan pluralisme agama dalam berbagai pemikiran dan sikap yang mengedepankan toleransi dan keterbukaan. Islam di Indonesia pun telah membuka persoalan pluralisme melalui para cendekiawan baik dari kalangan muslim maupun cendekiawan non muslim. Dari pihak muslim seperti Sayyed Hussein Nasr, Frithof Schuon (Muhammad Isa Nur al-Din), Muhammad Legenhausen, Farid esack, dan Abdul aziz Sachedina. Dari kalangan Kristiani seperti Willian Cantwell Smith, William Montgomery Watt, John Hick, dan keputusan Rekonsili Vatikan II (1962-1965).⁸

⁶ Jamal A. Badawi dalam Franz Magnis-Suseno dkk., *Memahami Hubungan antar Agama* (Yogyakarta: eLSAQ PRESS, 2007), 133-174. Lihat pula Muhammad Amin Suma, *Pluralisme agama Menurut Al-Qur'an Telaah Aqidah dan Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), 130-137.

⁷ Lihat dalam Anis Malik Toha, *Tren Pluralisme agama Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), 219-231.

⁸ Lihat Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural Menghargai Kemajemukan Menjalinkan Kebersamaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), xiv-xv.

Pluralisme, istilah awalnya adalah pluralisme agama. Secara terminologi, istilah ini memang populer dan disambut hangat secara universal, tetapi tidak sederhana memahaminya. Karena ia memiliki makna, historis. Pluralisme secara historis adalah diidentifikasi sebuah aliran filsafat, yang memenantang konsep negara absolut dan berdaulat. Pluralisme klasik adalah reaksi terhadap hukum tentang kedaulatan negara. Sedangkan pluralisme kontemporer, yang kemunculannya tahun 1950-an adalah tidak untuk menentang kedaulatan Negara tetapi untuk menentang elit⁹, tren,¹⁰ basis, misi, teori,¹¹ dan pengakuan agama-agama.¹²

Pluralisme di Indonesia, diakui oleh tokoh agama dan akademisi Franz Magnis-Suseno, merupakan kontribusi besar Islam. Islam adalah agama *fraternity* dan *equality*, dibangun atas dasar demokrasi dan peduli opini publik, anti kekerasan dan teror.¹³ Perjalanan pluralisme di Indonesia mengalami pasang surut, perkembangan mengawatirkan dan positif.¹⁴ John A. Titaley membuat catatan dari M.M. Thomas dari India dalam presentasinya di Cristian Conference of Asia (CCA) tahun 1996 di Manila tentang salah satu dari empat model negara contoh di Asia dalam menghadapi sekularisasi, yaitu negara Pancasila, Indonesia. Di mana ajaran, aliran, dan agama-agama diijinkan untuk hidup, dan diatur oleh negara.¹⁵

Pluralisme, dalam wujudnya membutuhkan aktualisasi, menimbulkan implikasi, merangsang peluang, merespon tantangan, dan menghadapi kendala dalam menghadapi globalisasi,¹⁶ dari generasi ke generasi berikutnya agar nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan budaya dapat dikembangkan. Upaya pengembangan nilai dan norma tersebut dalam hidup dan kehidupan terjadi dalam proses pendidikan. Hal ini selaras dengan makna pendidikan menurut Djumransyah (2006:22) dalam pengertiannya dimaknai sebagai upaya manusia menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan,

⁹Lihat *The Blackwell Encyclopedia of Political Institution* dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Terj. Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 146-147.

¹⁰ Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural Menghargai Kemajemukan Menjalin Kebersamaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 5.

¹¹Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme agama Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), 11-122.

¹²Gamal Al-Banna, *At Ta'adudiyah Fi Mujtama' Islamiy*. Ter. Ahmad Z.H. (Jakarta: MataAir Publishing, 2006), 1-5.

¹³Ahmad Syafi'i Ma'arif dkk., *Islam and Universal Values, Islam Contribution to The Constuction of Pluralistic World* (Jakarta: International Center for Islam and Pluralism, 2008), 39-48.

¹⁴ Alif Theria Wasim dkk. (Editor), *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik & Pendidikan* (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005), 9-21.

¹⁵ Alif Theria Wasim dkk. (Editor), *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik & Pendidikan* (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005), 115-124.

¹⁶Bedjo Sudjanto, *Pemahaman Kembali Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007), 28-71.

baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Upaya penanaman nilai-nilai, norma-norma dan pewarisannya terhadap generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan tersebut terjadi dalam suatu proses pendidikan.¹⁷

Fokus tulisan ini diarahkan pada tema Islam dan pluralisme. Namun karena luasnya tema tersebut dan keterbatasan kompetensi, referensi, dan mendekati konsentrasi, maka penulis membatasi pada masalah *Islam dan Pluralisme: Konsep dan Strategi Implementasi di Persekolahan*.

B. Pembahasan

1. Pengertian Pluralisme

Pluralisme berasal dari bahasa latin *plures* yang berarti “beberapa” dengan implikasi perbedaan.¹⁸ Dalam bahasa Inggris adalah *pluralism* berasal dari kata *plural* yang berarti “kemajemukan dan keragaman” dan *isme* berasal dari bahasa latin yang berarti paham. Secara terminologis pluralisme diartikan sebagai paham atau wacana keragaman agama.¹⁹

Pengertian pluralisme memiliki beberapa makna tergantung pada konteks yang dirujuknya. Diantara makna pluralisme itu:

1. Pluralisme dari sudut pandang filsafat menekankan doktrin tentang kemungkinan penyatuan pandangan universal penduduk dunia.
2. Perspektif etika dan sosiologi normatif, pluralisme etika yang tunduk pada wacana rasional dan terbuka²⁰.
3. Pluralisme menurut kaum pragmatis menggunakan konsep pluralisme dalam sosiologi pengetahuan. Pada saat yang sama pluralisme menjadi lawan bagi aparat negara monistik, maka dalam diskusi politik, “pluralisme berarti multi partai, desentralisasi aparat Negara, atau distribusi sumberdaya kekuasaan dalam masyarakat”.

¹⁷ Fuad A. Hamid, dan Syihabudin. Edit, *Memelihara Kerukunan Melalui Pendidikan Multikultural*(Jakarta: Kedeputan Bidang Koordinasi Pendidikan, agama dan Aparatur Negara, 2009), 351.

¹⁸ Komaruddin Hidayat (ed), *Passing Over Melintasi Batas Agama* (Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 1998)

¹⁹ Charles EF (ed), *New Practical Standard Dictionary*, Vol. A-P(New York: Funk and Wagnall Company, 1955), 1010. Menurut *The Oxford English Dictionary*, pluralism berarti “sebuah watak untuk menjadi plural”. Lihat dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, 146.

²⁰Konsep pluralisme ini awalnya dikemukakan oleh filosof pencerahan Christian Wolff dan Immanuel Kant. Meminjam terminologi Jurgen Habermas tentang pluralism etika. Lihat dalam Zakiyuddin Badhaway, *Ambivalensi Agama Konflik & Nirkekerasan* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 14.

4. Menurut sosiologi dan etnologi budaya, pluralisme adalah fragmentasi bahasa, agama, atau batasan lainnya.
5. Menurut sosiologi fungsional, pluralisme adalah diferensiasi masyarakat baik individual, organisasi formal, maupun masyarakat.
6. Konteks wacana ilmu sosial, pluralism adalah pengakuan terhadap keragaman dalam masyarakat dan sebagai prasyarat bagi pilihan dan kebebasan individu²¹.
7. Klaim pluralisme yang terangkum dalam tabel umum pengertian pluralisme adalah: kesetiaan menerima pluralitas, dorongan kebebasan termasuk kebebasan beragama, pilar demokrasi, membangun toleransi, bukan sinkretisme dan relativisme, mempunyai tempat yang sah dan berakar dalam agama Islam, mengakui keselamatan agama-agama, mendorong dialog antaragama dan antar iman, wadah konstitusional untuk pluralisme di Indonesia adalah Pancasila.²²

Sementara pluralisme dalam ilmu politik didefinisikan sebagai :

- a. Sebuah teori yang menentang kekuasaan monolitik negara dan bahkan menganjurkan untuk meningkatkan pelimpahan dan otonomi organisasi-organisasi utuama yang mewakili keterlibatan seseorang dalam masyarakat. Juga, percaya bahwa kekuasaan harus dibagi diantara partai-partai politik yang ada.
- b. Keberadaan toleransi keragaman kelompok-kelompok etnis budaya dalam suatu masyarakat atau negara, keragaman kepercayaan atau sikap yang ada pada sebuah badan atau institusi dan sebagainya.²³

Berdasarkan definisi tersebut, maka pluralisme mengandung pengertian pluralisme politik dan pluralisme sosial. Namun demikian, penulis dalam hal ini mendahulukan pembahasan pluralisme sosial kemudian pluralisme politik. Hal ini didasarkan beberapa pertimbangan yaitu; aspek-aspek agama lebih besar dari aspek-aspek yang lain, perbedaan agama merupakan perbedaan paling mendasar dalam

²¹. Lihat dalam Zakiyuddin Badhawiy, *Ambivalensi Agama Konflik & Nirkekerasan* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 14.

²²Lihat dalam Budhy Munawar dan Rachman, *Argumen Islam untuk Pluralisme*(Jakarta: Grasindo, 2010), 84-90.

²³Lihat J.A. Simpson dan E. S. C. Weiner, *The Oxford English Dictionary*, Vol. XI (Oxford: Clarendon Press, edisi ke-2, 1989), 1089 dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.Terj. Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 146-147.

kehidupan masyarakat, dan upaya mentransformasikan agama kedalam identitas etnis dan budaya, bahkan politik dan nasional²⁴.

2. Islam Dan Pluralisme Sosial

Kalangan sosiolog agama berpandangan terhadap pluralisme bergantung pada asumsi-asumsi teoritis masing-masing. Setidaknya menurut Ole Riis²⁵, ada tiga madzhab teoritis, yaitu : fungsionalisme, kognifisme, dan teori kritis. Tokoh madzhab fungsionalisme adalah Emiel Durkheim yang berpandangan bahwa agama adalah sebagai lembaga yang dibangun demi integrasi sosial. Tokoh kognitivisme adalah Max Weber, yang memandang bahwa individu dan kelompok dipandang bermakna oleh dunia ini. Sedangkan tokoh teori kritis misalnya Habermas, Houtart, atau Bourdieu yang memandang pelegetimasian struktur kekuasaan masyarakat²⁶.

Perspektif Islam dalam masalah pluralisme agama terlihat jelas melalui penjabaran, *pertama*, dasar-dasar teoritis yang terdiri dari dasar tauhid, dasar pluralitas adalah *sunnatullah*, dasar *kebebasan* beragama, dan dasar pluralisme perlu *frame of reference*. *Kedua*, kesaksian sejarah sepanjang zaman yang meliputi zaman *Rasulullah*, *khulafah al-Rashidi*.²⁷

Anis Malik Thoha mengklasifikasikan tren-tren pluralisme Agama ke dalam empat kategori : tren Humanisme Sekuler (*Secular Humanism*), tren Teologi Global (*Global Theology*) tren Sinkretisme (*Syncretism*), dan tren Hikmah Abadi (*Al-Hikmah al-Khalidah, Perennial Wisdom, Sophia Perennis* . Ciri Humanisme Sekular adalah “anthroposentris” berakar dari pemikiran Protagoras (490-420 SM) seorang pemuka kaum Shopist. Dari filosof inilah ditemukan pandangan “manusia adalah satu-satunya standar bagi segala sesuatu. Upaya sistematis yang menggunakan topeng teologis dari sebuah teori baru yang sangat krusial, yang dikenal dengan teori pluralisme. Tren pemikiran teologi global ini diusung baik oleh Wilfred Cantwell Smith dan John Hick

²⁴Lihat dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Terj. Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 146-147.

²⁵Ole Riis, “Model of Religious Under Condition of Globalization”, *MOST Journal on Multicultural Societies*, vol. 1, no. 1, 1999. Lihat dalam Zakiyuddin Badhawiy, *Ambivalensi Agama Konflik & Nirkekerasan* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 14.

²⁶Lihat dalam Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural Menghargai Kemajemukan Menjalinkan Kebersamaan*(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 36-38.

²⁷Sentralitas tauhid menjadi dasar teori pluralisme dalam bagaimana Islam melihat hakikat Tuhan, hakikat wahyu, hakikat manusia, dan hakikat masyarakat. Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), 180-231.

dengan membicarakan gagasan pluralism agama dengan perlunya membangun global theology. Sinkretisme adalah suatu kecenderungan pemikiran yang berusaha mencampur dan merekonsiliasi berbagai unsure yang berbeda-beda berasal dari berbagai agama dan tradisi dalam suatu wadah yang ada (wujud aliran baru). Hikmah abadi ini berambisi dan mengklaim ingin mengembalikan agama-agama ke habitat asal-kesucian dan kesakralannya yang sempurna lagi absolute, serta ingin memperlakukan semuanya secara adil dan sama rata semuanya.²⁸.

Cecelia Lync dalam Muhammad Ali²⁹, mengklasifikasikan sikap teologis sehubungan dengan multikulturalisme ke dalam 5 (lima) sikap, yaitu; (1) eksklusif, (2) inklusif, (3) pluralis, (4) apologetik³⁰, dan (5) sinkretik.

Sementara Alwi Shihab mengingatkan pemahaman pengertian konsep pluralisme dalam empat: *Pertama*, pluralisme tidak hanya menunjuk *kenyataan keragaman*, namun yang diharapkan adalah keterlibatan aktif terhadap kemajemukan. *Kedua*, pluralisme dibedakan dengan *kosmopolitanisme* Kosmopolitanisme menunjuk kepada suatu relita keaneka ragaman agama, ras, bangsa, hidup berdampingan di suatu lokasi, namun interaksi antar penduduk, khususnya bidang agama sangat minim. *Ketiga*, pluralisme bukan *relativisme*. Relativisme berasumsi bahwa kebenaran atau nilai ditentukan pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. Konsekwensi dari paham ini adalah doktrin agama apa pun harus dinyatakan benar, atau dengan perkataan lain semua agama adalah sama. *Keempat*, pluralisme adalah bukan *sinkretisme*.

³¹

Pluralisme agama merupakan batasan-batasan fungsional dari masing-masing agama dan kombinasinya yang layak, dan buka prinsip umum pluralism yang dapat menyebabkan kontroversi dan konflik³².

Pluralisme agama dapat dianalisis pada 3 (tiga) level sosial, baik makro, menengah, dan level mikro. Pada level makro, pluralisme agama menimbulkan pengakuan dan

²⁸Lihat dalam Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005), 109.

²⁹ Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural Menghargai Kemajemukan Menjalinkan Kebersamaan*(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 72-73.

³⁰Apologetik adalah sikap mempertahankan doktrin ketika ditantang dari luar. Lihat dalam Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural Menghargai Kemajemukan Menjalinkan Kebersamaan*(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 73.

³¹.Lihat dalam Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*(Bandung, Mizan, 1999), 42.

³²Lihat dalam Zakiyuddin Badhawiy, *Ambivalensi Agama Konflik & Nirkekerasan* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 17.

penerimaan masyarakat dalam bidang agama. Level menengah, pluralisme berimplikasi pada penerimaan keragaman organisasi keagamaan dalam unit-unit yang berkompetisi. Sedangkan pada mikro, pluralism agama adalah menimbulkan kebebasan individu untuk memilih dan mengembangkan kepercayaannya.³³

Harold Coward³⁴, memberikan cara merespon pluralisme agama: *Pertama*, logika bersama. Artinya Yang Satu yang berwujud banyak, secara filosofis dan teologis, logika ini merupakan sumber realitas dan cara paling signifikan untuk menjelaskan keanekaragaman agama. *Kedua*, agama sebagai alat Wahyu dan doktrin agama-agama adalah jalan untuk menuju yang satu. *Ketiga*, pengenalan kriteria yang mengabsahkan. Yang dimaksud adalah mengenakan criteria sendiri pada agama-agama lain.³⁵

Indonesia mengembangkan kerukunan dan toleransi beragama melalui trilogi kerukunan: *Pertama*, kerukunan intern umat beragama. *Kedua*, kerukunan antar umat beragama. *Ketiga*, kerukunan antar penganut agama dengan pemerintah³⁶.

Idealita dalam kehidupan kerukunan beragama masih jauh dengan fakta yang diharapkan. Hal ini dapat dianalisis dari pengakuan semua agama yang ada di Indonesia baik Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha yang saling mengenal agama resmi bahkan terhadap aliran yang diluar resmi, dan ketika perkembangan keberagamaan resmi menunjukkan peningkatan kuantitas, dan kualitas secara signifikan terutama Islam yang pemeluknya adalah mayoritas, namun demikian dicurigai isi keberagamaan meningkat namun di sisi lain berlangsungnya gejala deviansi, yakni disatu sisi kehidupan moral sangat menghawatirkan.³⁷

Pembinaan kerukunan antar umat beragama yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui Departemen Agama setidaknya membutuhkan 5 (lima) pendekatan, yaitu (1) pendekatan pragmatis, (2) pendekatan legalistik, (3) pendekatan kultural, (4) pendekatan sosio-institusional, dan (5) pendekatan teologi. Pendekatan pragmatis disebut *scurity approach*, merupakan pertolongan pertama untuk setiap ketegangan yang terjadi antar umat beragama. Pendekatan ini tidak ubahnya seperti pemadam kebakaran.. Pendekatan

³³Zakiyuddin Badhaw, *Ambivalensi Agama Konflik & Nirkekerasan* (Yogyakarta: LESFI, 2002), 14.

³⁴Harold Coward, *Pluralism, Challenge to World Religion*(New York, Inner Traditions International Ltd. 1995), 32-37.

³⁵ Lihat dalam Asep Syaefullah, *Merukunkan Umat Beragama Studi Pemikiran Tarmizi Taher tentang Kerukunan Umat Beragama*(Jakarta, Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), 182-183.

³⁶Asep Syaefullah, *Merukunkan Umat Beragama Studi Pemikiran Tarmizi Taher tentang Kerukunan Umat Beragama*(Jakarta, Grafindo Khazanah Ilmu, 2007), 182-183.

³⁷Nuridin H. Kistanto, Etika Pergaulan Sosial-Relijius dalam Masyarakat Majemuk dalam Alif Theria Wasim (Ed), *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik & Pendidikan* (Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005), 99-105.

legalistik adalah kerukunan yang dijalin dengan sejumlah peraturan perundang-udalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri. Pendekatan sosio-instutional yang dalam bentuk operasionalnya adalah diikat dalam forum kerukunan antarumat beragama (FKUB). Pendekatan kultural dilakukan dengan dialog antar umat beragama.. Pendekatan teologis adalah pendekatan yang dibangun dengan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri setiap umat beragama bukan secara eksternal.³⁸ Dialog antaragama dapat mengambil bentuk-bentuk sebagai berikut; *pertama*, dialog parlementer (*parliamentary dialogue*) yakni dialog yang melibatkan ratusan peserta. *Kedua*, dialog kelembagaan, yaitu dialog antar wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. *Ketiga*, dialog teologis (*theological dialogue*) yakni dialog yang membahas tentang persoalan teologis dan filosofis. *Keempat*, dialog dalam masyarakat (*dialogue in community*) dan dialog kehidupan (*dialogue of life*) yakni dialog yang umumnya berkonsentrasi pada penyelesaian hal-hal praktis dan actual yang menjadi perhatian bersama. *Kelima*. dialog spiritual (*spiritual dialogue*).³⁹

Untuk mendekati masalah pluralisme agama, umat beradgama dapat melakukan berbagai pendekatan sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing umat beragama. Pendekatan itu meliputi; *pertama*, pendekatan mistikal, yaitu hubungan intim anatar pemeluk agama dengan Tuhannya tidak mungkin diceritakan pada orang lain. Hal ini membuat yang bersangkutan toleran terhadap pengalaman orang lain. *Kedua*, pendekatan rasional dialogis, yaitu dialog keagamaan masing-masing sehingga orang lain memahami keyakinan agamanya secara rasional dan seobyektif mungkin. *Ketiga*, pendekatan emosional-apologetik, yaitu perdebatan mempertahankan keyakinan masing-masingdan berusaha menaklukkan pihak lain agar tunduk dan mengikuti keyakinan dirinya. *Keempat*, pendekatan dialog-konflikual, yaitu pertikaian pendapat yang emosional yang tidak menempatkan sikap toleran dan argument rasional tidak berperan secara proporsional. *Kelima*, pendekatan sinkretis-resiprokal, yaitu kedua belah pihak saling membuka diri dan berbagi pikiran, pengalaman, dan perasaannya masing-masing. *Keenam*, pendekatan keterlibatan persoalan keagamaan dengan pihak lain.⁴⁰

³⁸Lihat dalam Nur Achmad (Editor), *Pluralitas agama Kerukunan dalam Keragaman* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 127-132..

³⁹ Lihat dalam Ruslani, *Masyarakat Kitab dan dialog AntaragamaStudi Atas Pemikiran Mohammad Arkoun* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), 203-207.

⁴⁰ Ruslani, *Masyarakat Kitab dan dialog AntaragamaStudi Atas Pemikiran Mohammad Arkoun* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000), 201-203.

Meskipun pembangunan kehidupan umta beragama yang harmonis menghadapi tantangan yang berat, namun terdapat sejumlah peluang diantaranya; *pertama*, semua agama ingin mensejahterakan para pemeluknya. *Kedua*, agama-agama di Indonesia bersedia mengembangkan keberagaaan yang inklusif. *Ketiga*, hubungan kekerabatan dalam masyarakat Indonesia. *Keempat*, adanya kebiasaan-kebiasaan dan pranata sosial secara tradisional yang melembaga dan fungsional memelihara ketertiban, dan kerukunan masyarakat walaupun berbeda agama. *Kelima*, adanya upaya pemerintah untuk merukunkan umat beragama. *Keenam*, adanya dampak positif dan negatif dan ekonomi, yakni peningkatan wawasan keberagaman dari globalisasi informasi. *Ketujuh*, kemudahan bagi pemeluk agama untuk mengaktualisasikan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dari masing-masing kelompok agama.⁴¹

3. Islam Dan Pluralisme Politik

Sisi lain pluralisme adalah menentang kekuasaan monolitik negara dan mendukung peningkatan pelimpahan dan otonomi bagi organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan manusia dalam masyarakat, dan kekuasaan seperti itu harus dibagi di antara sejumlah partai-partai politik.⁴²

Pluralisme politik memiliki makna, penafsiran, aksi, konsep, dalil, historis, dan syarat dalam implementasinya. Pluralisme politik dimaknai dengan mempromosikan dan mengaktifkan partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik tidak hanya berbentuk aksi-aksi positif tetapi bias juga berbentuk aksi-aksi negatif termasuk aksi-aksi illegal atau kekerasan.⁴³

Dengan menafsirkan konsep *syura* (musyawarah), pluralisme politik menolak elitisme. *Syura* adalah benteng yang kuat melawan pelanggaran penguasa Negara, kezaliman, pemimpin diktator dan melawan system-sistem lain yang menindas hak-hak politik rakyat.⁴⁴

⁴¹ Said Agil Husin Al-Munawwar, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), xiii-xiv.

⁴²Lihat J.A. Simpson dan E. S. C. Weiner, *The Oxford English Dictionary*, Vol. XI (Oxford: Clarendon Press, edisi ke-2, 1989), 1089 dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.Terj. Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 146-147.

⁴³Lihat Joel Kreger dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.Terj. Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 166.

⁴⁴Lihat Amin Rais dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.Terj. Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 167.

Pluralisme politik adalah manifestasi dari *'amar ma'ruf dan nahyi munkar* (menganjurkan yang baik dan melarang yang jelek) disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an, misalnya Al-Qur'an (Q.S. [9]: 71) dan (Q.S. [103]: 1-3)⁴⁵, aplikasi salah satu prinsip-prinsip cita-cita politik Islam dalam Al-Qur'an (Q.S. [4]: 59), rakyat diwajibkan taat kepada penguasa selama penguasa tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran serta kezaliman⁴⁶, dan kaidah *Tasharrufu al-Ima>m Manu>thun bi Maslahati al-Ra-'iyah*, dalam kaidah ini agama diturunkan untuk kemaslahatan manusia.

Sejarah Islam menjadikan pluralisme politik legal yaitu tatkala Rasulullah s.a.w. menyebutkan orang-orang non-Muslim (Yahudi dan Kristiani) sebagai *ummatan wa>hidatan*, umat yang satu, berhak mendapatkan perlakuan sebagaimana mestinya muslim lainnya sebagaimana termaktub dalam salah satu pasal Piagam Madinah⁴⁷. Kemudian periode *al-Khulafa>' al-Ra>syidi>n*⁴⁸.

Syarat pluralisme politik yang harus dipenuhi pemerintah dan rakyat adalah adanya keterbukaan dan akses informasi, baik dalam hubungan antara pemerintah dengan rakyat, maupun antar individu, kelompok-kelompok dalam masyarakat⁴⁹. Kriteria dan prinsip pemerintahan yang sejalan dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah terpenuhi yaitu; *al-Shidqu wa al-Ama>nah* (kejujuran dan tanggungjawab), *al-Ada>lah* (keadilan), *al-Syu>ra* (permusyawaratan), *al-Musa>wah* (egaliteran)⁵⁰.

A. PERSEKOLAHAN

Menurut Ivan Illich⁵¹, sekolah adalah sebagai proses yang berkaitan dengan batas umur (*age-specific*) serta guru, yang menuntut kehadiran penuh mengikuti kurikulum wajib.

⁴⁵*Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.Terj. Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 168.

⁴⁶Lihat Muhammad Tahir Azhary dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.Terj. Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 169.

⁴⁷Lihat Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*(Jakarta: Paramadina, 2005), 149-150.

⁴⁸Lihat Nurcholish Madjid dalam Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.Terj. Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 169.

⁴⁹Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.Terj. Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999), 167.

⁵⁰Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri*(edit. Jauhar Hatta Hassan)(Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), 39-42.

⁵¹Ivan Illich, *Deschooling Society*, Harper & Row.New York: 1972.Terj. C.Woekirsari, *Bebas Dari sekolah*,(Jakarta : Sinar Harapan, 1982), 42.

Institusi Sekolah selalu dianggap sebagai salah satu tempat yang cocok untuk membelajarkan pendidikan agama disamping keluarga.⁵²

Fuad Hasan⁵³ menegaskan bahwa penyekolahan adalah salah satu bentuk upaya pendidikan. Pembiasaan dan peneladanan sangat besar pengaruhnya dalam upaya pendidikan. Pendidikan tidak hanya memindahkan pengetahuan atau *transfer of knowledge and skills* tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan sosial atau *transmission of culture values and social norm*. Untuk lebih mendekatkan fungsi sekolah terhadap pengajaran nilai-nilai baik yang direncanakan maupun tidak, menarik penjelasan Thomas (1997) dalam Muhaimin⁵⁴, bahwa kegiatan pendidikan di sekolah, baik melalui pembelajaran di dalam kelas atau diluar kelas, tidak pernah bebas nilai.

Secara umum pendidikan agama dan keagamaan berfungsi untuk membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, dan mampu menjaga kerukunan hubungan antar umat beragama (menghargai pluralisme). Selain itu untuk menumbuh kembangkan kemampuan peserta didik dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai agama yang mengimbangi penguasaannya dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.⁵⁵

Ngalim Purwanto,⁵⁶ memasukkan lingkungan sekolah ke dalam golongan lingkungan kedua, setelah yang pertama lingkungan keluarga dan ketiga lingkungan masyarakat. Kewajiban sekolah, selain mengajar (dalam arti hanya mengisi otak anak-anak dengan berbagai ilmu pengetahuan), juga berusaha membentuk pribadi anak menjadi manusia yang berwatak baik (diantaranya adalah sikap inklusif, menghargai pluralisme). Apa gunanya apabila anak-anak itu pandai-pandai dan dapat lulus semuanya, tetapi tingkah laku atau watak atau kepribadiannya tidak baik (eksklusif tidak menghormati dan menghargai pluralisme).

⁵²Agus Maimun, Abdul Mukti Basri, dan Hasanudin, *Profil Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Umum Tingkat Dasar*. (Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah Dan Pendidikan Umum Proyek Pemberdayaan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pada Madrasah Dan PAI Pada Sekolah Umum Tingkat Dasar, 2003), 2.

⁵³Fuad Hasan, "Pendidikan adalah Pembudayaan" dalam edit. Tonny D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*. (Jakarta : Kompas, 2004), 52-66.

⁵⁴Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 136.

⁵⁵Fauzan, "Dilema Baru Pendidikan Islam Pasca Otonomi Daerah", dalam Komaruddin Hidayat, at.al., *Mimbar Jurnal Agama dan Budaya Volume 24, No.4*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2007), 559.

⁵⁶Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), 127.

Institusi sekolah selalu dipandang sebagai salah satu tempat yang cocok untuk membelajarkan agama di samping keluarga. Pendidikan agama yang patut diajarkan di sekolah antara lain dikemukakan oleh Al-Maududi yang diambil dari sumber ajaran Islam sebagai berikut: penghayatan makna iman dan taqwa, sikap tolong menolong dalam berbuat kebajikan, sikap baik sangka, menghargai diri dan orang lain (menghargai pluralisme), bertanggungjawab atas perbuatan diri sendiri, sikap positif kepada guru dan teman, menjaga milik sendiri dan orang lain, disiplin waktu dalam mengerjakan tugas, bersikap jujur, adil, dan bijaksana, kepada diri sendiri dan orang lain⁵⁷.

B. PENDIDIKAN PLURALISME DI PERSEKOLAH

1. Pengertian Pendidikan Pluralisme

Perdebatan seputar definisi multikulturalisme memunculkan beberapa golongan pendapat, namun mayoritas negara dewasa ini memaknai multikulturalisme sebagai istilah positif yang dapat memberikan keuntungan-keuntungan signifikan bagi masing-masing negara yang mengaturnya. Dipihak lain, ada pendapat bahwa multikulturalisme diterapkan hanya kepada para imigran yang menolak budaya pribumi⁵⁸.

Pendidikan pluralisme-multikulturalisme, adalah proses penyadaran yang berwawasan pluralis (secara agama) dan sekaligus berwawasan multikultural (secara budaya). Pendidikan pluralisme-multikultural harus dilihat sebagai bagian dari usaha komprehensif menghindari, mencegah, dan mengulangi konflik bernuansa etnis, dan agama di masa mendatang⁵⁹.

Pendidikan pluralis-multikulturalisme seyogianya memfasilitasi proses belajar mengajar yang mengubah perspektif eksklusitas dalam beragama yang esensial, penuh prasangka dan bersifat diskriminatif ke perspektif pluralisme yang menghargai

⁵⁷Al-Maududi, *Islam Sebagai Pandangan Hidup* Ter. Iqbal, MS(Bandung: Sinar Baru, 1983) Lihat Agus Maimun, Abdul Mukti Bisri, dan Hasanudin, *Profil Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Sekolah Umum Tingkat Dasar*(Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Umum Proyek Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pada Madrasah dan PAi pada Sekolah Umum Tingkat Dasar, 2003), 2.

⁵⁸ Muhammad Ali, *Teologi Pluralisme-Multikultural Menghadapi Kemajemukan dan Menjalin Kebersamaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 91-92.

⁵⁹ Muhammad Ali, *Teologi Pluralisme-Multikultural Menghadapi Kemajemukan dan Menjalin Kebersamaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 99.

keragaman dan perbedaan, toleransi dan bersifat terbuka. Perubahan paradigma tersebut menuntut transformasi yang tidak terbatas hanya pada dimensi kognitif.⁶⁰

Pendidikan pluralis-multikulturalis tidak sekedar memahami keragaman agama dan budaya, tetapi juga memahami nilai-nilai bersama yang bisa di-*sharing* sebagai dasar hidup bersama (*vivre ensemble*). Tujuan pendidikan pluralis-multikulturalis adalah untuk menanamkan simpati, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda⁶¹.

Membangun kesadaran pluralis-multikulturalisme akan efektif manakala melalui jalur pendidikan. Hal ini disebabkan karena pendidikan adalah instrument yang efektif untuk proses internalisasi dan penyemaian nilai-nilai pluralisme, dan lewat jalur ini kesadaran pluralisme dapat tumbuh subur dan memasyarakat secara luas.⁶²

2. Reorientasi Pendidikan Agama Islam

Dalam era multireligius-multikultural seperti sekarang ini, diperlukan reorientasi dalam pendidikan agama Islam. Dalam hal ini reorientasi pendidikan agama dilakukan dalam empat hal yaitu: *Pertama*, melakukan transformasi dari agama ke religiusitas. *Kedua*, memasukkan kemajemukan, terutama kemajemukan agama, sebagai bagian dari upaya memperkaya pengalaman beragama. *Ketiga*, lebih menekankan pada pembentukan sikap. *Keempat*, pengajaran ilmu-ilmu keislaman, melainkan perlu diuraikan dimensi historis dari doktrin-doktrin keagamaan tersebut.⁶³

3. Pendekatan

a. Pendidikan Pluralis-Multikulturalisme sebagai Mata Pelajaran Wajib dan Muatan Lokal

Pendidikan pluralis-multikulturalisme sebagai mata pelajaran adalah salah satu model ideal. Ada dua kemungkinan, yaitu dijadikan sebagai mata pelajaran wajib yang termuat dalam kurikulum nasional dan sebagai mata pelajaran dalam kurikulum muatan lokal. Keduanya memiliki keuntungan, dasar, dan kendala

⁶⁰Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam*(Jakarta: Ciputat Press, 2003), 213.

⁶¹ Muhammad Ali, *Teologi Pluralisme-Multikultural Menghadapi Kemajemukan dan Menjalinkan Kebersamaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 103.

⁶²Ngainun Naim dan Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* Jogjakarta, Ar-Ruzz Media Group, 2008), 153.

⁶³Ngainun Naim dan Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* Jogjakarta, Ar-Ruzz Media Group, 2008), 176-182.

Keuntungan pendidikan pluralis-multikulturalisme menjadi sebuah mata pelajaran wajib secara kurikuler dapat disusun dengan kebutuhan, kualifikasi tenaga pendidik ditentukan dengan jelas, memungkinkan munculnya pendekatan dan model pembelajaran. Dasar pertimbangan pendidikan pluralis-multikulturalisme menjadi sebuah mata pelajaran wajib adalah; tuntutan kondisi obyektif masyarakat Indonesia, tuntutan UUSPN tahun 2003. Kendala pelaksanaan pendidikan pluralis-multikulturalisme menjadi sebuah mata pelajaran wajib adalah; akan menambah beban kurikulum nasional, sementara kecenderungan pengembangan kurikulum nasional dewasa ini kearah perampingan.⁶⁴

b. Pendidikan Pluralisme Terintegrasi dengan Mata Pelajaran yang Relevan

Model integrasi dengan mata pelajaran yang relevan dalam pelaksanaannya bukan mata pelajaran yang berdiri sendiri, melainkan dititipkan pada beberapa mata pelajaran yang relevan dengan pertimbangan dan hambatan tersendiri. Kemungkinan dapat diterapkan model pendidikan pluralis-multikulturalisme melalui integrasi mata pelajaran yang relevan karena beberapa pertimbangan yaitu; sangat efisien karena tidak menambah mata pelajaran dan jam pelajaran dalam kurikulum nasional, cukup banyak mata pelajaran yang relevan, seperti; agama, PPKn, B. Indonesia, sosiologi, antropologi, dan lainnya. Hambatannya adalah kurang optimal, dan kurang penting karena sebagai pelajaran titipan⁶⁵.

c. Pilar Pendidikan pluralis-Multikulturalisme

Pada umumnya pendidikan konvensional hanya bersandar pada tiga pilar pendidikan yaitu; *how to know*, *how to do*, dan *how to be*. Pada konteks ini yang terpenting adalah pilar yang keempat yaitu *how to live and work together with others*. Penanaman pilar yang keempat ini dapat dilakukan dalam praktik pendidikan melalui empat pilar lainnya yaitu; *pertama*, pengembangan sikap toleran, empati, dan simpati. *Kedua*, membangun saling percaya (*mutual trust*). *Ketiga*, memelihara

⁶⁴ Lihat Fuad Abdul Hamied dalam Yadi Ruyadi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Strategi Implementasi di Persekolahan, dalam, *Memelihara Kerukunan melalui Pendidikan Multikultural*(Jakarta: Kedepatian Bidang Koordinator Pendidikan, Agama, dan Aparatur Negara Kementerian Koordinator Bidang Kesra RI, 2009), 369-377.

⁶⁵ Lihat Fuad Abdul Hamied dalam Yadi Ruyadi, Pendidikan Multikultural Konsep dan Strategi Implementasi di Persekolahan, dalam, *Memelihara Kerukunan melalui Pendidikan Multikultural*(Jakarta: Kedepatian Bidang Koordinator Pendidikan, Agama, dan Aparatur Negara Kementerian Koordinator Bidang Kesra RI, 2009), 377-378.

saling pengertian (*mutual understanding*). Keempat, menjunjung tinggi sikap saling menghargai.⁶⁶

d. Model Pembelajaran

Model-model pembelajaran pendidikan lintas budaya yang pernah diterapkan di Sekolah Menengah Umum Terpadu (SMUT), dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori : Model Pengembangan, Model Kepekaan dan orientasi Kelompok, dan Model Partisipatif. Model Pengembangan adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan tahapan perkembangan siswa. Model Kepekaan dan Orientasi Kelompok membantu keterbukaan pikiran dan kepekaan siswa terhadap orang lain. Model Pembelajaran Partisipatif adalah pendidik berupaya membantu siswa untuk berpartisipasi dalam perencanaan program pembelajaran.⁶⁷

C. Kesimpulan

Islam adalah agama holistik agama publik, dan agama penutup yang mengajarkan ketuhanan dan kemanusiaan, termasuk di dalamnya persoalan pluralism. Pengertian pluralisme dalam hal ini dapat dikategorikan dalam pluralism sosial dan pluralism politik.

Pluralisme sosial memiliki makna, historis tren, basis, misi, teori, dan pengakuan agama-agama. Begitu pun pluralisme politik memiliki makna, penafsiran, aksi, konsep, dalil, historis, dan syarat dalam implementasinya.

Pluralisme, dalam wujudnya membutuhkan aktualisasi dari generasi ke generasi berikutnya agar nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan budaya dapat dikembangkan. Upaya pengembangan nilai dan norma tersebut dalam hidup dan kehidupan terjadi dalam proses pendidikan.

Pendidikan pluralisme di persekolah memerlukan kejelasan pengertian pendidikan pluralisme itu sendiri, perlu upaya reorientasi pendidikan agama Islam, dan pendekatan pelaksanaan pendidikan, serta model pendidikan pluralism di persekolahan.

D. Daftar Pustaka

Agus Maimun, Abdul Mukti Basri, dan Hasanudin, *Profil Pendidikan Agama Islam (PAI) Sekolah Umum Tingkat Dasar*. (Jakarta : Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah Dan Pendidikan

⁶⁶Ngainun Naim dan Akhmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* (Jogjakarta: Arruzz Media, 2008), 213-215.

⁶⁷ Lihat Djudju Sudjana, Pendidikan Budaya Ragam di SMU Terpadu dalam *Mimbar Pendidikan No. 1 Tahun XVI 1997*.25-26.

- Umum Proyek Pemberdayaan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pada Madrasah Dan PAI Pada Sekolah Umum Tingkat Dasar, 2003)
- Ahmad Syafi'i Ma'arif dkk., *Islam and Universal Values, Islam Contribution to The Constuctionof Pluralistic World* (Jakarta: International Center for Islam and Pluralism, 2008)
- Alif Theria Wasim dkk.(Editor), *Harmoni Kehidupan Beragama: Problem, Praktik & Pendidikan*(Yogyakarta: Oasis Publisher, 2005)
- Al-Maududi, *Islam Sebagai Pandangan Hidup* Ter. Iqbal, MS(Bandung: Sinar Baru, 1983)
- Lihat Agus Maimun, Abdul Mukti Bisri, dan Hasanudin, *Profil Pendidikan Agama Islam (PAI) Model Sekolah Umum Tingkat Dasar*(Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Umum Proyek Pemberdayaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pada Madrasah dan PAi pada Sekolah Umum Tingkat Dasar, 2003)
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*(Bandung, Mizan, 1999), 42.
- Anis Malik Toha, *Tren Pluralisme agama Tinjauan Kritis* (Jakarta: Perspektif, 2005)
- Asep Syaefullah, *Merukunkan Umat Beragama Studi Pemikiran Tarmizi Taher tentang Kerukunan Umat Beragama*(Jakarta, Grafindo Khazanah Ilmu, 2007)
- Bedjo Sudjanto, *Pemahaman Kembali Bhineka Tunggal Ika Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*(Jakarta: CV. Sagung Seto, 2007)
- Charles EF (ed), *New Practical Standard Dictionary*, Vol. A-P(New York: Funk and Wagnall Company, 1955)
- Djudju Sudjana, Pendidikan Budaya Ragam di SMU Terpadu dalam *Mimbar Pendidikan No. 1 Tahun XVI 1997*.
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*(Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Fauzan, “*Dilema Baru Pendidikan Islam Pasca Otonomi Daerah*”, dalam Komaruddin Hidayat,at.al., *Mimbar Jurnal Agama dan Budaya Volume 24,No.4*, (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2007)
- Franz Magnis–Suseno dkk., *Memahami Hubungan antar Agama* (Yogyakarta: eLSAQ PRESS, 2007)
- Fuad A. Hamid, dan Syihabudin. Edit, *Memelihara Kerukunan Melalui Pendidikan Multikultural*(Jakarta: Kedeputian Bidang Koordinasi Pendidikan, agama dan Aparatur Negara, 2009)

- Fuad Hasan, "Pendidikan adalah Pembudayaan" dalam edit.Tonny D. Widiastono, *Pendidikan Manusia Indonesia*.(Jakarta : Kompas, 2004)
- Gamal Al-Banna, *At Ta'adudiyah Fi Mujtama' Islamy* . Ter. Ahmad Z.H.(Jakarta: MataAir Publishing, 2006)
- Harold Coward, *Pluralism, Challenge to World Religion*(New York, Inner Traditions International Ltd. 1995)
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid I(Yogyakarta: UII Press), 31-49. Khamami Zada, Arif R. Arafah, *Diskursus politik Islam*(Jakarta: LSIP, 2004)
- Ivan Illich, *Deschooling Society*, Harper & Row.New York: 1972.Terj. C.Woekirsari, *Bebas Dari sekolah*,(Jakarta : Sinar Harapan, 1982)
- Komaruddin Hidayat (ed), *Passing Over Melintasi Batas Agama*(Jakarta: Gramedia dan Paramadina, 1998)
- Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*.Terj. Wahib Wahab (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1999)
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*, (Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2006)
- Muhammad Ali, *Teologi Pluralis-Multikultural Menghargai Kemajemukan Menjalini Kebersamaan*(Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003)
- Muhammad Amin Suma, *Pluralisme agama Menurut Al-Qur'an Telaah Aqidah dan Syari'ah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001)
- Ngainun Naim dan Ahmad Sauqi, *Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi* Jogjakarta, Ar-Ruzz Media Group, 2008)
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis Dan Praktis* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998)
- Nurcholish Madjid dkk, *Fiqh Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*(Jakarta: Paramadina, 2005)
- Ole Riis, "Model of Religious Under Condition of Globalization", *MOST Journal on Multicultural Societies*, vol. 1, no. 1, 1999.
- Ruslani, *Masyarakat Kitab dan dialog Antaragama Studi Atas Pemikiran Mohammad Arkoun* (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2000)
- Said Agil Husin Al Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Qur'an dalam Sistem Pendidikan Islam*(Jakarta: Ciputat Press, 2003)

_____, *Fikih Hubungan Antar Agama* (Jakarta: Ciputat Press,
2003)

Said Aqiel Siradj, *Islam Kebangsaan Fiqh Demokratik Kaum Santri*(edit. Jauhar Hatta
Hassan)(Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999)

Zakiyuddin Badhawiy, *Ambivalensi Agama Konflik & Nirkekerasan* (Yogyakarta: LESFI,
2002), 4.